PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN RASIO UTANG TERHADAP KEBERLANJUTAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

TIUR ENJEL SINAGA
NIM. B1031211226

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN RASIO UTANG TERHADAP KEBERLANJUTAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

OLEH

TIUR ENJEL SINAGA
NIM. B1031211226

TUGAS AKHIR INI DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN KARYA ILMIAH SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang Terhadap Keberlanjutan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, yang diuji pada **24 Juni 2026** adalah karya saya bukan *plagiarism,* baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan atau meniru karya tulis orang lain, maka gelar dan ijazah kesarjanaan saya dibatalkan.

Pontianak, 24 Juni 2026
Pembuat Pernyataan

Tiur Enjel Sinaga
NIM. B1031211226

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Tiur Enjel Sinaga
NIM	:	B1031211226
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Akuntansi
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang Terhadap Keberlanjutan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Tahun 2018 (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 24 Juni 2026
Pembuat Pernyataan

Tiur Enjel Sinaga
NIM. B1031211226

LEMBAR YURIDIS

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN RASIO UTANG TERHADAP KEBERLANJUTAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab Yuridis

Tiur Enjel Sinaga
NIM. B1031211226

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 24 Juni 2026

Majelis Penguji

No	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing I	Dr. Sari Rusmita., S.E., M.M. NIP. 198109162006042001.		
2	Pembimbing II	Djuanita Permata Indah., S.E., M.Acc. NIP. 199106142019032019.		
3	Penguji I	Dr. Syarbini Ikhsan., S.E., M.M. NIP. 196512201994021001.		
4	Penguji II	Ariefanda Iqbal Perdhana., S.E., M.Ak. NIP. 199202292023211015.		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak,
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita., S.E., M.Si.
NIP. 197906182002122003.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang Terhadap Keberlanjutan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat"** yang disusun sebagai syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko., S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Barkah., S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Nella Yantiana., S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Syarif M. Helmi., S.E., M.Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. Khristina Yunita., S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Dr. Sari Rusmita., S.E., M.M., sebagai Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Djuanita Permata Indah., S.E., M.Acc., sebagai Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

8. Dr. Syarbini Ikhsan., S.E., M.M., sebagai Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan, nasehat didalam penulisan skripsi.
9. Ariefanda Iqbal Perdhana., S.E., M.Ak., sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, nasehat didalam penulisan skripsi.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penulisan skripsi ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan dan studi. Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pontianak, 24 Juni 2026
Peneliti

Tiur Enjel Sinaga
NIM. B1031211226

The Influence of Financial Independence and Debt Ratio on Regional Financial Sustainability in West Kalimantan Province

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of financial independence and debt ratio on regional financial sustainability in West Kalimantan Province. The type of method used in this study is a descriptive-quantitative method. The data amounted to 70, namely from 2019 to 2023 (14 regencies and cities). Furthermore, the methods and analysis tools used are panel data methods, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. Tools for processing data using the eviews software program version 10.0. The results of the data analysis show that 1) financial independence has a positive and significant effect on financial sustainability, and finally 2) the debt ratio has a positive and significant effect on financial sustainability.

Keywords: Financial Independence, Debt Ratio and Financial Sustainability.

Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang Terhadap Keberlanjutan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pengaruh kemandirian keuangan dan rasio utang terhadap keberlanjutan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Adapun data berjumlah 70, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 (14 Kabupaten dan Kota). Selanjutnya metode dan alat analisis yang digunakan ialah metode data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi liniear berganda dan pengujian hipotesis. Alat bantu dalam mengelolah data dengan menggunakan program *software eviews versi 10.0*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, dan terakhir 2) rasio utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, Rasio Utang dan Keberlanjutan Keuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR ..... **ii**
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **iii**
LEMBARAN PENGESAHAN (YURIDIS) ..... **iv**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
ABSTRACT ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.2.1. Pernyataan Masalah 8
1.2.2. Pertanyaan Penelitian 9
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Kontribusi Penelitian 9
BAB 2 TELAAH PUSTAKA **11**
2.1. Tinjauan Teori 11
2.1.1. Keberlanjutan Finansial 12
2.1.2. Kemandirian Keuangan 14
2.1.3. Rasio Utang Daerah 17
2.2. Tinjauan Empiris 18
2.3. Pengaruh Antar Variabel-Variabel Penelitian 19
2.3.1. Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Keberlanjutan Keuangan 19
2.3.2. Pengaruh Rasio Utang Terhadap Keberlanjutan Keuangan 20

2.4. Kerangka Konseptual 21
BAB 3 METODE PENELITIAN 22
3.1. Bentuk, Tempat dan Waktu Penelitian 22
3.2. Jenis dan Sumber Data 22
3.3. Variabel Penelitian 23
3.4. Metode dan Alat Analisis 23
3.4.1. Metode Estimasi dan Pemilihan Model Data Panel 24
3.4.2. Uji Asumsi Klasik 26
3.4.2.1. Uji Normalitas 26
3.4.2.2. Uji Multikolinieritas 26
3.4.3. Analisis Regresi Liniear Berganda 26
3.4.4. Uji Hipotesis 27
3.4.4.1. Uji Kelayakan Model *(Goodness of Fit)* 27
3.4.4.2. Uji Parsial (Uji t) 28
3.4.4.3. Uji Koefisien Determinasi *(R-Squared)* 28
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 30
4.1. Hasil Penelitian 30
4.1.1. Gambaran Umum Penelitian 30
4.1.2. Hasil Metode Model Data Panel 31
4.1.2.1. Hasil Uji *Common Effect Model* (CEM) 32
4.1.2.2. Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM) 33
4.1.2.3. Hasil Uji *Random Effect Model* (REM) 33
4.1.2.4. Hasil Uji *Chow* 33
4.1.2.5. Hasil Uji *Hausman* 34
4.1.2.6. Hasil *Lagrange Multiplier* 34
4.1.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 34
4.1.3.1. Hasil Uji Multikolinieritas 34
4.1.4. Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda 35
4.1.5. Hasil Uji Hipotesis 37
4.1.5.1. Hasil Uji Kelayakan Model *(Goodness of Fit)* 37
4.1.5.2. Hasil Uji Parsial (Uji t) 38

4.1.5.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi *(R-Squared)* 39
4.2. Pembahasan 40
4.2.1. Pengaruh Kemandirian Keuangan (KK) Terhadap Keberlanjutan Keuangan (KF) 40
4.2.2. Pengaruh Rasio Utang (RU) Terhadap Keberlanjutan Keuangan (KF) 44
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 50
5.1. Kesimpulan 50
5.2. Saran 51
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN 54

DAFTAR TABEL

TABEL **HALAMAN**

3.1. Teknik Pemilihan Model Regresi Data Panel 25

4.1. Hubungan Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang Terhadap Keberlanjutan Keuangan di 14 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat . 30

4.2. Regresi Data Panel *Common Effect Model* (CEM) 32

4.3. Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM) 32

4.4. Regresi Data Panel *Random Effect Model* (REM) 33

4.5. Hasil Pengujian *Chow Test* (CEM VS FEM) 33

4.6. Hasil Pengujian *Hausman Test* (REM VS REM) 34

4.7. Hasil Uji Multikolinieritas 35

4.8. Hasil Regresi Linier Berganda dengan Model *Fixed Effect Model* (FEM) 37

4.9. Hasil Uji Kelayakan Model *(Goodness of Fit)* 37

4.10. Hasil Uji Parsial (Uji t) 38

4.11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 39

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR **HALAMAN**

1.1. Rata-Rata Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 s/d 2023 (Persen) 2
1.2. Rata-Rata Keberlanjutan Keuangan 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 s/d 2023 2
1.3. Rata-Rata Kemandirian Keuangan 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 s/d 2023 4
1.4. Rata-Rata Rasio Utang 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 s/d 2023
2.1. Kerangka Konseptual..... 20
3.1. Model Regresi Linear Berganda..... 28
4.1. Model Regresi Linear Berganda..... 36

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN **HALAMAN**

Lampiran I Data Olahan Eviews Versi 10.0 54
Lampiran II Data Olahan Logaritma Natural (LN) Eviews Versi 10.0 56
Lampiran III Output Olahan Eviews Versi 10.0 58
Lampiran IV Titik Persentase Distribusi F_{tabel} 64
Lampiran V Titik Persentase Distribusi t_{tabel} 70

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

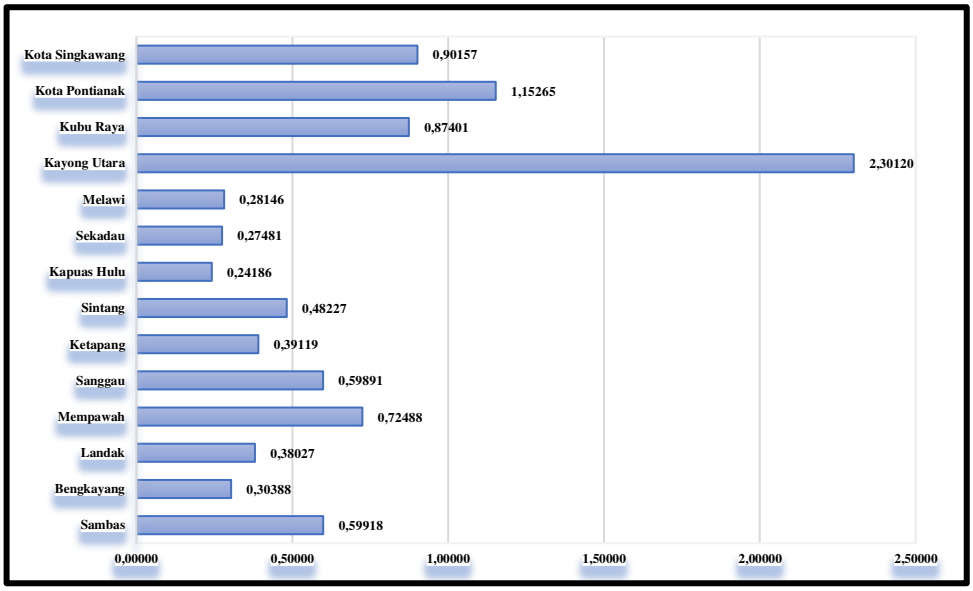
Konsep dari otonomi daerah merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sistem otonomi daerah merupakan bentuk penyelenggaraan dari pemerintah daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan otonomi memuat hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Berdasarkan konsep otonomi daerah tersebut, maka setiap daerah di Indonesia dituntut untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat namun, tetap memperhatikan kondisi keuangan pemerintah daerahnya (Aryasi *et al*, 2023). Kondisi keuangan disuatu daerah dapat dikatakan baik apabila kondisi keuangan dari daerah tersebut "berkelanjutan" (Aryasi *et al*, 2023). Konsep keberlanjutan keuangan atau *financial sustainability* merupakan konsep yang menekankan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik (Aryasi *et al*, 2023).

Keberlanjutan keuangan atau *financial sustainability* mencerminkan kapasitas pemerintah untuk mengelola sumber daya yang ada secara efektif tanpa perlu menambah utang. Konsep keberlanjutan keuangan atau *financial sustainability* (FS) semakin relevan bagi entitas publik, khususnya pemerintah daerah, yang menghadapi penurunan pendapatan dan pemotongan belanja (Santis *et al*., 2021). Bagian penting dalam FS adalah pengelolaan keuangan atas pembangunan infrastruktur pada pemerintah daerah. Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) No. 62 Tahun 2023 mengatur tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, yang mencakup berbagai aspek.

Berdasarkan Gambar 1.1 yang memuat data rata-rata keberlanjutan keuangan dari 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya variasi yang cukup mencolok antar daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Kayong Utara menempati peringkat tertinggi dengan nilai keberlanjutan sebesar 2,30120, jauh di atas Kabupaten/ Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang relatif tinggi dan pengelolaan keuangan yang efisien dalam jangka waktu lima tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Data Olahan Peneliti Tahun 2025

Gambar 1.1
Rata-Rata Keberlanjutan Keuangan 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 s/d 2023

Sebaliknya, terdapat beberapa daerah yang menunjukkan angka keberlanjutan keuangan yang tergolong rendah, seperti Kabupaten Kapuas Hulu (0,24186), Kabupaten Melawi (0,28146), dan Kabupaten Sekadau (0,27481). Rendahnya nilai ini mengindikasikan potensi ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat atau lemahnya kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara seimbang. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbatasnya potensi ekonomi lokal, dan ketidakefisienan dalam belanja

publik. Daerah-daerah dengan nilai keberlanjutan rendah perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam hal penguatan kapasitas fiskal dan strategi peningkatan PAD.

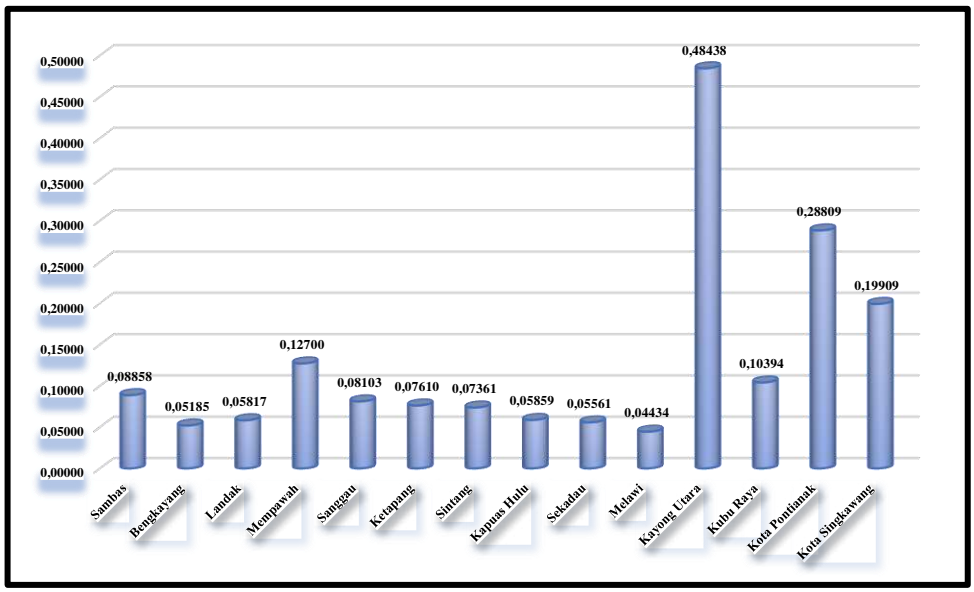
Sementara itu, Kota Pontianak (1,15265) dan Kota Singkawang (0,90157) juga menampilkan kinerja keberlanjutan keuangan yang relatif tinggi. Kedua kota ini secara konsisten menunjukkan kapasitas fiskal yang baik, yang umumnya ditunjang oleh struktur ekonomi yang lebih mapan, aktivitas perdagangan dan jasa yang dominan, serta basis PAD yang lebih kuat. Hal ini memperkuat argumen bahwa kota-kota cenderung memiliki keunggulan fiskal dibandingkan daerah kabupaten, terutama karena peran mereka sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian, data ini memberikan gambaran bahwa tingkat keberlanjutan keuangan sangat dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi lokal, kapasitas manajerial fiskal, serta efektivitas kebijakan keuangan daerah, yang dapat menjadi fokus utama dalam strategi peningkatan kemandirian dan keberlanjutan fiskal di Provinsi Kalimantan Barat.

Manajemen keuangan daerah yang tidak efektif dan efisien dapat mengakibatkan kondisi keuangan yang tidak stabil sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Borio *et al*., 2023). Penilaian terhadap keberlanjutan keuangan merupakan salah satu aspek penting untuk mempertahankan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan dan memperoleh biaya di masa depan (Gleibner *et al*., 2022). Faktor-faktor terkait kebijakan pengeluaran dan pendapatan, pembayaran utang, dan faktor-faktor sosial-ekonomi dan lingkungan di masa depan menjadi faktor yang menentukan *financial sustainability* suatu daerah (Lhutfi & Sugiharti, 2022).

Menurut Rohmadani *et al* (2024), kemandirian keuangan yang baik di suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan penerimaan asli daerah (PAD) secara optimal tanpa bergantung pada pinjaman atau sumber dana dari pihak luar. Kondisi ini penting karena mengurangi risiko beban utang yang berlebihan, serta meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan, tetapi juga mendukung

terciptanya keberlanjutan finansial jangka panjang yang mampu mendanai berbagai kebutuhan pembangunan daerah secara mandiri.

Gambar 1.2 mengenai rata-rata kemandirian keuangan 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019 hingga 2023, terlihat bahwa sebagian besar daerah masih memiliki tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan capaian tinggi, di antaranya adalah Kabpaten Kayong Utara (0,48438), Kota Pontianak (0,28809), dan Kota Singkawang (0,19909). Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pusat. Mayoritas seperti Kabupaten Melawi (0,04434), Kabupaten Sekadau (0,05561), dan Kabupaten Kapuas Hulu (0,05859) mencatatkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah, di bawah angka 0,06. Ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih kecil, dan potensi ekonomi lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan kapasitas fiskal tersebut dapat menjadi hambatan bagi daerah dalam mengembangkan program pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Data Olahan Peneliti Tahun 2025

Gambar 1.2
Rata-Rata Kemandirian Keuangan 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 s/d 2023

Adapun tingginya kemandirian keuangan di Kota Pontianak dan Kota Singkawang, serta Kabupaten Kayong Utara, kemungkinan besar dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi lokal seperti aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata, serta sistem administrasi pajak dan retribusi daerah yang lebih tertata. Kota cenderung memiliki basis PAD yang lebih kuat dibandingkan kabupaten karena aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan sumber pajak yang lebih beragam. Hal ini memperkuat argumen bahwa peningkatan kemandirian keuangan perlu diarahkan melalui penguatan basis PAD, inovasi fiskal, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal. Tanpa upaya strategis tersebut, keberlanjutan fiskal jangka panjang akan sulit dicapai, terutama bagi daerah-daerah yang masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat.

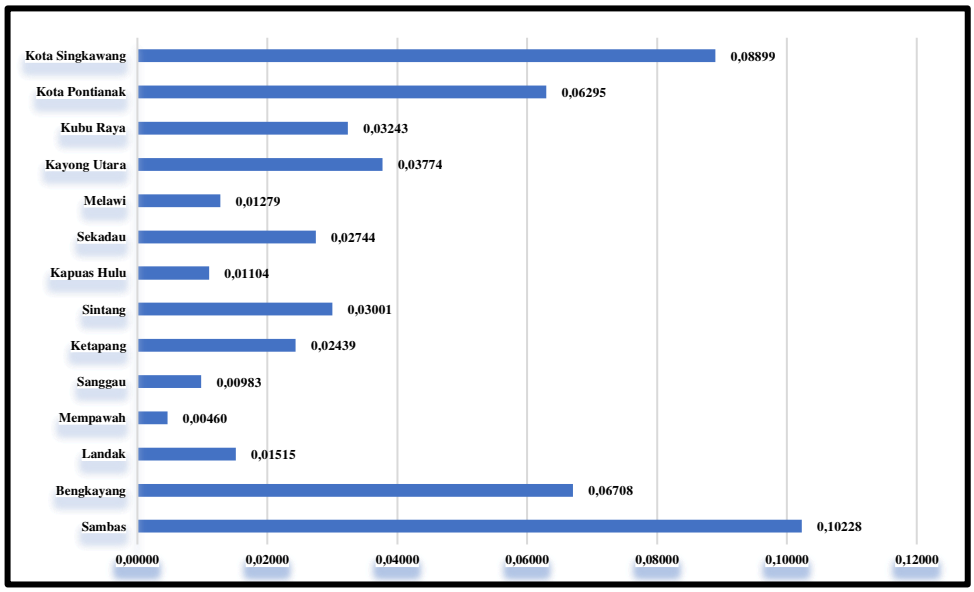
Kemandirian keuangan daerah dapat diartikan sebagai sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal melalui penerimaan asli daerah (PAD) untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman luar. Kondisi ini penting untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, fleksibel, dan berdaya tahan terhadap fluktuasi ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Rohmadani *et al*. (2024), menyatakan bahwa kemandirian keuangan yang tinggi di suatu daerah memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan finansial jangka panjang. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjaga stabilitas anggaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, studi oleh Setiawan & Lestari (2023) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi risiko ketergantungan fiskal yang berlebihan dan mengurangi ancaman defisit anggaran.

Daerah dengan pendapatan yang rendah khususnya PAD akan lebih mengandalkan dana transfer dari pusat dan sumber dana lainnya tak terkecuali pinjaman (utang). Menurut Wardhani & Payamta, (2020) apabila suatu daerah mempunyai PAD yang tinggi maka pemerintah daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk mendanai fasilitas terkait pelayanan dan infrastruktur tanpa terbebani adanya ketergantungan utang kepada pihak lainnya, sehingga keuangan

daerah dapat terus berkelanjutan. Sebaliknya, apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah, tidak memungkinkan bagi daerah tersebut untuk melakukan pinjaman daerah.

Ketergantungan yang tinggi terhadap pinjaman dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, yang berpotensi menciptakan krisis keuangan di masa depan. Daerah yang memiliki rasio utang terhadap total pendapatan yang tinggi akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas keuangan, karena beban utang tersebut dapat berlanjut ke periode anggaran berikutnya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan keuangan di daerah tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Data Olahan Peneliti Tahun 2025

Gambar 1.3
Rata-Rata Rasio Utang 14 Kabupaten dan Kota
di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 s/d 2023

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat ketergantungan terhadap utang daerah masih tergolong rendah. Rasio utang menggambarkan proporsi beban kewajiban utang terhadap pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk belanja, sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat risiko fiskal suatu pemerintah daerah. Dari data yang ada, terlihat bahwa sebagian besar daerah memiliki rasio utang di bawah 0,05 atau 5%,

yang menunjukkan bahwa utang bukan merupakan komponen dominan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa daerah dengan rasio utang relatif tinggi jika dibandingkan dengan lainnya, seperti Kabupaten Sambas (0,10228) dan Kota Singkawang (0,08899). Meskipun angka ini masih dalam batas wajar dan terkendali berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan, kondisi ini tetap perlu mendapat perhatian karena menunjukkan bahwa sebagian kecil pemerintah daerah mulai menggunakan utang sebagai alat pembiayaan pembangunan. Hal ini bisa mencerminkan adanya kebutuhan fiskal yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi oleh PAD maupun dana transfer, sehingga utang menjadi salah satu alternatif untuk mendorong program pembangunan prioritas.

Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Mempawah (0,00460), Kabupaten Sanggau (0,00983), dan Kabupaten Kapuas Hulu (0,01104) menunjukkan tingkat rasio utang yang sangat rendah, bahkan mendekati nol. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal atau mungkin juga mencerminkan terbatasnya akses terhadap pinjaman daerah. Meskipun rendahnya utang dapat menjadi sinyal positif dari sisi risiko fiskal, hal ini juga bisa menunjukkan bahwa daerah tersebut belum memanfaatkan potensi pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara kehati-hatian fiskal dan pemanfaatan pembiayaan yang bijak guna meningkatkan keberlanjutan keuangan daerah secara optimal.

Rasio utang daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberlanjutan keuangan suatu daerah. Daerah yang terlalu banyak melakukan pinjaman daerah akan berdampak pada beban utang yang tidak dapat dikendalikan dengan baik yang dapat menyebabkan akumulasi beban utang yang berlebihan bagi suatu daerah yang menyebabkan tingkat keberlanjutan finansial menurun (Al-Obaidi & Almashhadani, 2023). Hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Rohmadani *et al* (2024); Campos *et al* (2023); dan Frintrup & Hilgers, (2023) menyatakan bahwa rasio utang daerah memiliki hubungan negatif terhadap keberlanjutan keuangan daerah.

Berdasarkan deskripsi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penting untuk memahami hubungan antara kemandirian keuangan dan rasio utang terhadap keberlanjutan finansial suatu daerah, khususnya di daerah-daerah Provinsi Kalimantan Barat. Setiap daerah di Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakteristik ekonomi, tingkat penerimaan asli daerah (PAD), serta kemampuan pengelolaan keuangan yang berbeda-beda. Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah (pemda) mampu mengelola PAD untuk membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan eksternal. Di sisi lain, rasio utang menjadi indikator penting yang mengukur tingkat ketergantungan pemda terhadap pinjaman dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, judul penelitian ini dapat dirumuskan menjadi "Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat".

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Konsep otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal secara mandiri. Namun, meskipun daerah memiliki kebebasan dalam mengelola keuangannya, banyak daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh, pada Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerahnya berasal dari dana perimbangan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah dan kemampuan mereka untuk mempertahankan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Kemandirian keuangan daerah yang baik dapat memastikan daerah tidak bergantung pada sumber eksternal, sementara itu analisis terkait rasio utang merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mendukung keberlanjutan keuangan daerah. Rasio utang daerah yang tinggi dapat membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara kemandirian

keuangan dan rasio utang terhadap keberlanjutan finansial daerah, khususnya di 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah kemandirian keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah rasio utang berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian keuangan terhadap keberlanjutan keuangan pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh rasio utang terhadap keberlanjutan keuangan pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun kontribusi yang diharapakan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi teoritis, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan informasi ilmiah mengenai pengaruh kemandirian keuangan dan rasio utang terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada aspek pengelolaan keuangan daerah dengan pendekatan yang lebih luas atau pada konteks daerah lainnya yang memiliki karakteristik berbeda.
2. Kontribusi praktis, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat, dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengelola rasio utang dengan lebih baik. Selain itu, hasil

penelitian ini juga dapat menjadi data tambahan bagi instansi terkait dalam merencanakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan keuangan daerah, serta memberikan informasi penting mengenai hubungan antara pengelolaan keuangan dan stabilitas fiskal di Provinsi Kalimantan Barat.